

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Untuk kepentingan penelitian ini digunakan data sekunder berupa data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pringsewu dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung tahun 2008 - 2013 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

B. Variabel Data

Variabel adalah subyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 1998:33). Variabel dalam penelitian ini meliputi :

1. Laju pertumbuhan ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi berlaku atau tidak. Laju pertumbuhan ekonomi diukur dengan indikator perkembangan PDRB dari tahun ke tahun yang dinyatakan dalam persen per tahun. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pembangunan daerah dilihat dari besarnya pertumbuhan PDRB setiap tahunnya.

2. Pertumbuhan sektor ekonomi

Pertumbuhan sektor ekonomi adalah pertumbuhan nilai barang dan jasa dari setiap sektor ekonomi yang dihitung dari angka PDRB atas dasar harga konstan dan dinyatakan dalam persentase.

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB dalam penelitian ini dilihat menurut pendekatan produksi yaitu merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi (di suatu region) pada suatu jangka waktu tertentu (setahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) sektor.

Dalam penyajian ini PDRB dihitung berdasarkan harga tetap (harga konstan), yaitu harga yang berlaku pada tahun dasar yang dipilih. Perhitungan berdasarkan harga konstan ini dilakukan karena sudah dibersihkan dari unsur inflasi.

4. Sektor - sektor ekonomi

Sektor - sektor ekonomi yaitu sektor pembentuk angka PDRB yang berperan dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi.

5. Komponen *Share*

Komponen *Share* adalah pertambahan PDRB suatu daerah seandainya pertambahannya sama dengan pertambahan PDRB daerah dengan skala yang lebih besar selama periode waktu tertentu.

6. Komponen *Net Shift*

Komponen *Net Shift* adalah komponen nilai untuk menunjukkan penyimpangan dari komponen *Share* dalam ekonomi regional.

7. Komponen *Differential Shift*

Komponen *Differential Shift* adalah komponen untuk mengukur besarnya *Shift Netto* yang digunakan oleh sektor tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat di daerah yang bersangkutan dibandingkan daerah yang skalanya lebih besar.

8. Komponen *Proportional Shift*

Komponen *Proportional Shift* adalah komponen yang digunakan untuk menghasilkan besarnya *Shift Netto* sebagai akibat dari PDRB daerah yang bersangkutan berubah. Komponen bernilai positif apabila daerah yang diteliti (Kota/Kabupaten) berspesialisasi dalam sektor yang di tingkat daerah dengan skala lebih besar (Propinsi/Nasional) tumbuh lebih cepat, sebaliknya bernilai negatif apabila daerah yang diteliti (Kota/Kabupaten) berspesialisasi pada sektor yang di tingkat daerah dengan skala lebih besar (Propinsi/Nasional) tumbuh dengan lambat.

C. Metode Pengumpulan Data

Keberhasilan dalam pengumpulan data merupakan syarat bagi keberhasilan suatu penelitian. Sedangkan keberhasilan dalam pengumpulan data tergantung pada metode yang digunakan. Berkaitan dengan hal tersebut maka pengumpulan data

diperlukan guna mendapatkan data - data yang obyektif dan lengkap sesuai dengan permasalahan yang diambil.

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara untuk memperoleh kenyataan yang mengungkapkan data-data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan metode dokumentasi, yaitu suatu cara memperoleh data atau informasi tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan penelitian dengan jalan melihat kembali laporan tertulis yang lalu baik berupa angka maupun keterangan (Arikunto, 1998:131).

D. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisa kualitatif melalui pendekatan basis ekonomi. Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Location Quotient (LQ)*

Location Quotient adalah suatu metode untuk menghitung perbandingan relatif sumbangan nilai tambah sebuah sektor di suatu daerah (Kabupaten/Kota) terhadap sumbangan nilai tambah sektor yang bersangkutan dalam skala Provinsi atau Nasional. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki suatu daerah yaitu membaginya menjadi dua golongan yaitu sektor basis dan sektor non basis. Analisis *Location Quotient* dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan merumuskan komposisi dan pergeseran sektor - sektor basis suatu wilayah dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator pertumbuhan wilayah.

Perhitungan LQ menggunakan rumus sebagai berikut (Warpani, 1984:68) :

$$LQ = \frac{\frac{S_i}{S}}{\frac{N_i}{N}}$$

Keterangan :

LQ : Nilai Location Quotient

S_i : PDRB Sektor i di Kabupaten Pringsewu

S : PDRB total di Kabupaten Pringsewu

N_i : PDRB Sektor i di Provinsi Lampung

N : PDRB total di Provinsi Lampung

Berdasarkan hasil perhitungan LQ dapat dianalisis dan disimpulkan sebagai berikut :

- a) Jika LQ lebih besar dari satu ($LQ > 1$), merupakan sektor basis dan berpotensi untuk ekspor, artinya spesialisasi Kabupaten/Kota lebih tinggi dari tingkat Provinsi.
- b) Jika LQ lebih kecil dari satu ($LQ < 1$), merupakan sektor non basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih rendah dari tingkat Provinsi.
- c) Jika LQ sama dengan satu ($LQ = 1$), berarti tingkat spesialisasi di Kabupaten sama dengan tingkat Provinsi.

Asumsi dari teknik ini adalah bahwa semua penduduk di setiap daerah mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan pada tingkat Nasional, produktivitas tenaga kerja sama dan setiap industri menghasilkan barang yang homogen.

Secara keseluruhan analisis *LQ* memberikan petunjuk yang sangat baik untuk melihat keadaan ekonomi wilayah dan potensinya dimasa yang akan datang. Sedangkan kelemahannya antara lain merupakan indikator kasar yang deskriptif, merupakan kesimpulan sementara dan tidak memperhatikan struktur ekonomi setiap daerah, selera atau pola konsumsi dari anggota masyarakat adalah berlainan baik antar daerah maupun dalam suatu daerah, serta adanya perbedaan sumberdaya yang bisa dikembangkan disetiap daerah. Kelemahan dari metoda *LQ* tersebut hendaknya tidak terlalu ditonjolkan karena metoda *LQ* memiliki pula kelebihan penting, yaitu memperhitungkan ekspor tidak langsung dan ekspor langsung.

a. Penjelasan tentang tipologi

Tipologi mendasarkan pengelompokkan suatu sektor, subsektor, usaha atau komoditi daerah dengan cara membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah (atau nasional) yang menjadi acuan dan membandingkan pangsa sektor, subsektor, usaha, atau komoditi suatu daerah dengan nilai rata-ratanya di tingkat yang lebih tinggi (daerah acuan atau nasional). Hasil analisis Tipologi akan menunjukkan posisi pertumbuhan dan pangsa sektor, subsektor, usaha, atau komoditi pembentuk variabel regional suatu daerah.

Tabel 5. Makna Tipologi Sektor Ekonomi

Tipologi	LQ Rata-rata	Dj Rata-Rata	Pj Rata-rata	Tingkat Kepotensialbilitiy
I	$(LQ > 1)$	$(Dj > 0)$	$(Pj > 0)$	Istimewa
II	$(LQ > 1)$	$(Dj > 0)$	$(Pj < 0)$	Baik sekali
III	$(LQ > 1)$	$(Dj < 0)$	$(Pj > 0)$	Baik
IV	$(LQ > 1)$	$(Dj < 0)$	$(Pj < 0)$	Lebih dari cukup
V	$(LQ < 1)$	$(Dj > 0)$	$(Pj > 0)$	Cukup
VI	$(LQ < 1)$	$(Dj > 0)$	$(Pj < 0)$	Hampir dari cukup
VII	$(LQ < 1)$	$(Dj < 0)$	$(Pj > 0)$	Kurang
VIII	$(LQ < 1)$	$(Dj < 0)$	$(Pj < 0)$	Kurang sekali

Sumber : Saerofie. 2005 : 66

Tipologi sektoral tersebut adalah sebagai berikut :

Tipologi I : Sektor tersebut adalah sektor basis dengan LQ rata - rata > 1 dan pertumbuhan di Kabupaten Pringsewu lebih cepat dibandingkan Provinsi Lampung (Dj rata-rata > 0) meskipun di tingkat Provinsi Lampung pertumbuhannya cepat (Pj rata - rata > 0).

Tipologi II : Sektor tersebut adalah sektor basis dengan LQ rata - rata > 1 dan pertumbuhan di Kabupaten Pringsewu lebih cepat dibandingkan dengan Provinsi Lampung (Dj rata - rata > 0) karena ditingkat Provinsi Lampung pertumbuhannya lambat (Pj rata - rata < 0).

Tipologi III : Sektor tersebut adalah sektor basis dengan LQ rata - rata > 1 dan di Kabupaten Pringsewu pertumbuhannya lebih lambat dibanding

Provinsi Lampung ($Dj \text{ rata - rata} < 0$) karena ditingkat Provinsi Lampung pertumbuhannya cepat ($Pj \text{ rata - rata} > 0$).

Tipologi IV : Sektor tersebut adalah sektor basis dengan $LQ \text{ rata - rata} > 1$ dan di Kabupaten Pringsewu pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan Provinsi Lampung ($Dj \text{ rata - rata} < 0$) padahal ditingkat Provinsi Lampung pertumbuhannya juga lambat ($Pj \text{ rata - rata} < 0$).

Tipologi V : Sektor tersebut adalah sektor non basis dengan $LQ \text{ rata-rata} < 1$ dan pertumbuhan di Kabupaten Pringsewu lebih cepat di banding pertumbuhan di tingkat Provinsi Lampung ($Dj \text{ rata - rata} > 0$) padahal di Provinsi sendiri pertumbuhannya juga cepat ($Pj \text{ rata - rata} > 0$).

Tipologi VI : Sektor tersebut adalah sektor non basis dengan $LQ \text{ rata - rata} < 1$ dan pertumbuhan di Kabupaten Pringsewu lebih cepat di banding pertumbuhan di tingkat Provinsi Lampung ($Dj \text{ rata - rata} > 0$) meskipun di Provinsi Lampung sendiri pertumbuhannya lambat ($Pj \text{ rata - rata} < 0$)

Tipologi VII : Sektor tersebut adalah sektor non basis dengan $LQ \text{ rata-rata} < 1$ dan pertumbuhan di Kabupaten Pringsewu lebih lambat di banding Provinsi Lampung ($Dj \text{ rata-rata} < 0$) meskipun di Provinsi Lampung sendiri pertumbuhannya lambat ($Pj \text{ rata - rata} > 0$).

Tipologi VIII : Sektor tersebut adalah sektor non basis dengan $LQ \text{ rata - rata} < 1$ dan pertumbuhan di Kabupaten Pringsewu lebih lambat di banding

Provinsi Lampung dengan D_j rata - rata < 0 meskipun di tingkat Provinsi Lampung sendiri pertumbuhannya lambat ($P_j < 0$).

2. Analisis *Shift Share*

Analisis *Shift Share* digunakan untuk menganalisis dan mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian di daerah. Metode itu dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekankan pertumbuhan sektor di daerah, yang dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi atau Nasional. Perekonomian daerah yang didominasi oleh sektor yang lamban pertumbuhannya akan tumbuh dibawah tingkat pertumbuhan perekonomian daerah di atasnya.

Analisis *Shift Share* merupakan teknik yang sangat berguna dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian Nasional. Analisis ini bertujuan untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan daerah yang lebih besar.

Analisis ini memberikan data tentang kinerja perekonomian dalam 3 bidang yang berhubungan satu dengan yang lainnya (Arsyad, 1999:314), yaitu :

- a) Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan cara menganalisis perubahan pengerjaan agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan pada sektor yang sama di perekonomian yang dijadikan acuan.
- b) Pergeseran proporsional (*proportional shift*) mengukur perubahan relatif, pertumbuhan atau penurunan, pada daerah dibandingkan dengan

perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan. Pengukuran ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat daripada perekonomian yang dijadikan acuan.

- c) Pergeseran diferensial (*differential shift*) membantu kita dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan acuan. Oleh karena itu, jika pergeseran diferensial dari suatu industri adalah positif, maka industri tersebut lebih tinggi daya saingnya daripada industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan acuan.

Rumus dari analisis *Shift Share* adalah sebagai berikut (Glasson, 1990:95-96):

$$\begin{aligned}
 G_j & : Y_{jt} - Y_{j0} \\
 & : (N_j + P_j + D_j) \\
 N_j & : Y_{j0} (Y_t / Y_o) - Y_{j0} \\
 (P + D)_j & : Y_{jt} - (Y_t / Y_o) Y_{j0} \\
 P_j & : \sum_i [(Y_{it} / Y_{i0}) - (Y_t / Y_o)] Y_{ij0} \\
 D_j & : \sum_t [Y_{ijt} - (Y_{it} / Y_{i0}) Y_{ij0}] \\
 & : (P + D)_j - P_j
 \end{aligned}$$

Dimana :

$$\begin{aligned}
 G_j & : \text{Pertumbuhan PDRB Total Kabupaten Pringsewu} \\
 N_j & : \text{Komponen } \textit{Share} \\
 (P + D)_j & : \text{Komponen } \textit{Net Shift} \\
 P_j & : \textit{Proportional Shift} \text{ Kabupaten Pringsewu} \\
 D_j & : \textit{Differential Shift} \text{ Kabupaten Pringsewu} \\
 Y_j & : \text{PDRB Total Kabupaten Pringsewu} \\
 Y & : \text{PDRB Total Provinsi Lampung} \\
 o,t & : \text{Periode awal dan Periode akhir}
 \end{aligned}$$

i : Subskripsi sektor pada PDRB

Jika $P_j > 0$, maka Kabupaten Pringsewu akan berspesialisasi pada sektor yang di tingkat Provinsi tumbuh lebih cepat. Sebaliknya jika $P_j < 0$, maka Kabupaten Pringsewu akan berspesialisasi pada sektor yang di tingkat Provinsi tumbuh lebih lambat.

Bila $D_j > 0$, maka pertumbuhan sektor i di Kabupaten Pringsewu lebih cepat dari pertumbuhan sektor yang sama di Provinsi Lampung dan bila $D_j < 0$, maka pertumbuhan sektor i di Kabupaten Pringsewu relatif lebih lambat dari pertumbuhan sektor yang sama di Provinsi Lampung

E. Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu

1. Letak Geografis Kabupaten Pringsewu

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tanggamus, dan dibentuk berdasarkan Undang - Undang Nomor 48 tahun 2008 tanggal 26 November 2008 dan diresmikan pada tanggal 3 April 2009 oleh Menteri Dalam Negeri. Secara geografis Kabupaten Pringsewu terletak diantara $104^{\circ}45'25''$ – $105^{\circ}08'42''$ Bujur Timur (BT) dan $5^{\circ}08'10''$ - $5^{\circ}34'27''$ Lintang Selatan (LS), dengan luas wilayah dimiliki sekitar 625 km^2 atau 62.500 Ha .

Secara administratif Kabupaten Pringsewu berbatasan dengan 3 (tiga) wilayah Kabupaten sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung dan Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah.
- b) Sebelah Timur berbatasan Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Gedongtataan, Kecamatan Waylima dan Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran.
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bulok dan Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus.
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pugung dan Kecamatan Air Nanningan, Kabupaten Tanggamus.

Kabupaten Pringsewu terdiri dari 9 (sembilan) wilayah Kecamatan, yaitu : 1. Kecamatan Pardasuka, 2. Kecamatan Ambarawa, 3. Kecamatan Pagelaran, 4. Kecamatan Pagelaran Utara, 5. Kecamatan Pringsewu, 6. Kecamatan Gading Rejo, 7. Kecamatan Sukoharjo, 8. Kecamatan Banyumas, dan 9. Kecamatan Adiluwih. Sekitar 41,79% wilayah Kabupaten Pringsewu merupakan areal datar (0-8%) yang tersebar di Kecamatan Pringsewu, Ambarawa, Gadingrejo dan Sukoharjo. Untuk lereng berombak (8-15%) memiliki sebaran luasan sekitar 19,09% yang dominan terdapat di Kecamatan Adiluwih. Sementara kelerengan yang terjal (>25%) memiliki sebaran luasan sekitar 21,49% terdapat di Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pardasuka.

2. Kependudukan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2013) pada tahun 2013 jumlah penduduk di Kabupaten Pringsewu mencapai 379.190 jiwa. Mengalami kenaikan sekitar 2,44% dari tahun 2012 dimana pada tahun tersebut jumlah penduduk hanya

mencapai 370.157 jiwa. Pada tahun 2013 Kecamatan Pringsewu merupakan Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak mencapai 78,043 jiwa, disusul oleh Gadingrejo dan Sukoharjo. Kedua Kecamatan ini mempunyai luas wilayah yang lebih besar dibandingkan dengan Kecamatan Pringsewu. Kabupaten Pringsewu mengalami penurunan kepadatan penduduknya per kilometer persegi, dimana pada tahun 2012 kepadatannya 592,25 jiwa/km², menjadi 606,70 jiwa/km². Hal ini berarti setiap 1 km² suatu wilayah mendapat tambahan penduduk sekitar 14 jiwa.

Tabel 6. Luas, penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten Pringsewu Tahun 2013

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Kepadatan Penduduk/km ²
1	Pardasuka	94.64	17355	15990	33345	343,95
2	Ambarawa	30.99	17082	16422	33504	1.055,37
3	Pegelaran	172.75	31851	29321	61172	345,67
4	Pringsewu	53.29	39908	39058	78966	1.446,50
5	Gadingrejo	85.71	36945	34983	71928	819,22
6	Sukoharjo	72.95	23666	22721	46387	620,73
7	Banyumas	39.85	10187	9527	19714	482,91
8	Adiluwih	74.82	17503	16671	34174	445,87
Total		625	194497	184693	379190	592,25

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Pringsewu

3. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita Kabupaten Pringsewu Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2008 sebesar Rp. 2.251.265. PDRB Perkapita Kabupaten Pringsewu Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2009 sebesar Rp. 2.536.310 meningkat 12,66 % dibandingkan dengan tahun 2008, sedangkan PDRB Perkapita Kabupaten Pringsewu Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2010 kembali mengalami

peningkatan sebesar 17,80% atau menjadi sebesar Rp. 2.987.723. Jika dibandingkan dengan PDRB Perkapita daerah Kabupaten/ Kota lainnya di Provinsi Lampung pada tahun yang sama maka PDRB Perkapita Kabupaten Pringsewu tahun 2008 - 2010 berada pada urutan ke-11 atau urutan ke-3 terendah.

4. Inflasi

Kota Pringsewu selama periode Januari sampai Agustus tahun kalender 2011 mengalami inflasi sebesar 2,49 persen, inflasi Kota Pringsewu ini lebih rendah dibandingkan inflasi Kota Bandar Lampung yakni sebesar 2,82 persen dan inflasi nasional sebesar 2,69 persen. Laju inflasi tertinggi tahun kalender 2011 (Januari-Agustus) di Kota Pringsewu terjadi pada kelompok sandang, yaitu sebesar 10,19 persen. Sedangkan di Kota Bandar Lampung terjadi di kelompok kesehatan sebesar 8,49 persen. Sedangkan laju inflasi terendah tahun kalender 2011 (Januari-Agustus) di Kabupaten Pringsewu terjadi pada kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar -0,13 persen. Sedangkan untuk Kota Bandar Lampung dan Nasional terjadi pada kelompok bahan makanan masing-masing sebesar 0,10 persen dan 1,85 persen. Terjadinya perbedaan inflasi pada kelompok pengeluaran tertentu merupakan gambaran adanya perbedaan pola konsumsi di antar Kota.

5. Indeks Ketimpangan Pembangunan (Williamson Index)

Nilai koefisien Indeks *Williamson* menyatakan bahwa semakin mendekati nilai nol berarti berarti semakin tidak ada ketimpangan dan semakin nilai koefisiennya mendekati 1 berarti semakin mendekati ketimpangan. Pembangunan di Kabupaten

Pringsewu tahun 2007 hingga tahun 2010 tidak terjadi ketimpangan. Hal itu dapat dilihat dari nilai koefisien indeks ketimpangan (*williamsonindex*) yang jauh dari angka 1 (satu). Nilai koefisien indeks wiiliamson Kabupaten Pringsewu tahun 2007 - 2010 hanya berkisar antara 0,115 hingga 0,121 dengan rata - rata nilai indeks ketimpangan sebesar 0,117.

6. Pendidikan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2013) dalam kurun waktu 2012 sampai 2013 angka melek huruf Kabupaten Pringsewu mengalami sedikit perubahan yaitu 96,09% pada tahun 2012 96,20% pada tahun 2013. Begitu pula untuk rata - rata lama sekolah penduduk Pringsewu yaitu 8,62 tahun pada tahun 2012 menjadi 8,64 tahun pada tahun 2013, dengan demikian Kabupaten Pringsewu menempati posisi ketiga setelah kota Metro dan kota Bandar Lampung dari 14 Kabupaten Kota se Provinsi Lampung. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi bidang pendidikan di Pringsewu mengalami kemajuan.

7. Transportasi

Letak Kabupaten Pringsewu yang strategis di Jalur Lintas Barat yang merupakan salah satu jalur tersibuk di Provinsi lampung menuju sejumlah Provinsi di pantai barat Sumatera, membuat posisi Kabupaten Pringsewu sangat potensial untuk pengembangan sektor perdagangan dan jasa, baik usaha perdagangan kecil, menengah maupun usaha perdagangan besar.

Dengan adanya sebuah terminal (Terminal Pringsewu) yang melayani baik jasa angkutan kota, angkutan perdesaan, angkutan perbatasan, serta bus antar kota

dalam Provinsi dan antar Provinsi yang melayani masyarakat dengan jasa transportasi yang memadai, menjadikan kota ini semakin eksis sebagai salah satu Kota tersibuk di Provinsi Lampung.

8. Pelayanan Kesehatan

Di bidang pelayanan Kesehatan, di Kabupaten Pringsewu telah terdapat **Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu**, Rumah Sakit Swasta, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pringsewu, serta terdapat pula Balai pengobatan serta Fasilitas Kesehatan milik swasta lainnya.

9. Pusat perbelanjaan

Guna melayani kebutuhan warga, di pusat kota Pringsewu sendiri terdapat 4 buah pasar tradisional yakni Pusat Perbelanjaan Pringsewu, Pasar Sarinongko, Pasar Baru Pringsewu, dan Pasar Pagi yang siap melayani masyarakat Pringsewu dan sekitarnya. Selain itu terdapat pula pasar kecamatan yang berada di setiap ibukota kecamatan serta pasar desa. Bahkan, telah ada satu pusat perbelanjaan modern yaitu Chandra Department Store Pringsewu yang diresmikan mantan Pejabat Bupati Pringsewu Sudarno Eddi pada tanggal 11 November 2011.

10. Kemiskinan

Pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pringsewu berjumlah 94.091 jiwa, sedangkan rumah tangga miskin berjumlah 25.370. Angka kemiskinan di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2009 sebesar 25,79%. Penduduk

diatas garis kemiskinan di Kabupaten Pringsewu tahun 2009 sebesar 74,21%. Jika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga miskin di Provinsi Lampung maka jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Pringsewu tahun 2009 berada pada peringkat ke 11 dari 14 daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2009 tergolong sedikit jika dibanding dengan jumlah rumah tangga miskin pada daerah Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Lampung pada tahun yang sama. Jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2009 hanya sebesar 3,23% dari jumlah total rumah tangga miskin di Provinsi Lampung. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2010 mengalami penurunan yang cukup tajam jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2009) atau menjadi sebesar 45.417 jiwa pada tahun 2010 dari sebesar 94.091 jiwa pada tahun 2009. Tingkat kemiskinan Kabupaten Pringsewu pada tahun 2010 sebesar 12,45%. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung kurun waktu yang sama (2010) maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2010 berada pada urutan ke-4 (empat) terendah dari 14 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung

Garis Kemiskinan (KG) sebagai indikator pendapatan minimum masyarakat yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi pada tahun 2010 di Kabupaten Pringsewu adalah sebesar Rp237.868/kap/bln. Jika dibandingkan dengan GK Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Lampung maka GK Kabupaten Pringsewu pada tahun 2010 berada pada urutan ke-11 (sebelas), lebih tinggi dari Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tanggamus dan lebih rendah dari Kabupaten Mesuji, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro.